



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MERESPON DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI JAWA TENGAH: AGEN ADAPTASI, KETAHANAN SOSIAL-EKOLOGIS, DAN POLITIK PERUBAHAN IKLIM

Puji Lestari,¹ M. Fikri Amrulloh,² Sanita Carolina Sasea,³ Arvangga Oktadian Krisbiyantoro⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Juni

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kepemimpinan perempuan dalam merespons dampak perubahan iklim, serta mengevaluasi implementasi kebijakan adaptasi iklim di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap visi-misi Pilkada 2024, dokumen Program Kampung Iklim (ProKlim), RPJMD, dan berbagai kebijakan terkait. Lokasi penelitian meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pesisir Jawa Tengah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Hasil penelitian menunjukkan; (1) isu perubahan iklim telah masuk dalam diskursus politik lokal, namun belum menjadi agenda strategis pembangunan daerah. Temuan ini menunjukkan adanya *climate politics gap*, yaitu kesenjangan antara realitas ekologis yang dihadapi masyarakat pesisir dan prioritas agenda politik daerah. (2) perempuan berperan sebagai agen sekaligus *climate leaders* melalui kegiatan konservasi mangrove, penguatan ekonomi rumah tangga, pengelolaan Program Kampung Iklim (ProKlim), pengembangan usaha mikro, serta pengorganisasian komunitas. Perempuan tidak hanya berkontribusi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga membangun ketahanan sosial-ekologis (*social-ecological resilience*) melalui penguatan jaringan sosial, ketahanan ekonomi keluarga, dan solidaritas komunitas. Meskipun demikian, kepemimpinan perempuan masih menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan akses pendanaan, rendahnya representasi dalam pengambilan keputusan, serta kuatnya budaya patriarki. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menggeser perspektif perempuan dari kelompok rentan (*climate victims*) menjadi pemimpin adaptasi iklim (*climate leaders*), mengintegrasikan pendekatan gender dengan konsep ketahanan sosial-ekologis, serta menunjukkan pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan perubahan iklim di tingkat daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh penguatan kapasitas sosial masyarakat yang banyak dimediasi melalui kepemimpinan perempuan.

Kata kunci:

adaptasi iklim;
kepemimpinan; perempuan;
perubahan iklim.

Abstract

This study explores women's leadership in responding to the impacts of climate change and evaluates the implementation of climate adaptation policies in Central Java. This research uses a qualitative approach obtained through field observations, in-depth interviews, and a documentary study of the 2024 regional election vision and mission, the Climate Village Program (ProKlim) document, the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), and various related policies. The research locations include Semarang City, Demak Regency, and Kendal Regency, coastal areas in Central Java that are vulnerable to climate change.

The results show: (1) climate change issues have entered local political discourse, but have not yet become a strategic agenda for regional development. This finding indicates a climate politics gap, namely the gap between the ecological realities faced by coastal communities and the priorities of the regional political agenda. (2) women act as agents and climate leaders through mangrove conservation activities, household economic strengthening, Climate Village Program (ProKlim) management, micro-enterprise development, and community organizing. Women not only contribute to environmental protection but also build socio-ecological resilience by strengthening social networks, family economic resilience, and community solidarity. Despite this, women's leadership still faces various obstacles, including limited access to funding, low representation in decision-making, and a strong patriarchal culture. This research provides theoretical contributions by shifting women's perspectives from those of vulnerable groups (climate victims) to those of climate

adaptation leaders, integrating a gender approach with the concept of socio-ecological resilience, and demonstrating the importance of gender mainstreaming in climate change policies at the subnational level. These findings emphasize that successful adaptation to climate change is determined not only by infrastructure development but also by strengthening community social capacity, largely mediated through women's leadership.

* E-mail

pujilestarikrisbiyanto@mail.unn
es.ac.id

©2026 Published by UNNES. This is an open-access

P ISSN: 2252-9195 E-ISSN: 2714-6189

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan, termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial (Lee, et al, 2023). Di Indonesia, dampak perubahan iklim semakin nyata dari tahun ke tahun dengan meningkatnya suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai (Aldian, et.al., 2025; Purify, et al., 2025; Mabui, et al., 2024). Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan ekosistem yang beragam, mengalami dampak signifikan akibat perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan permukiman pesisir (Ariadi, 2023).

Menghadapi dampak tersebut, adaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya membutuhkan intervensi teknis dan kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat lokal. Salah satu aktor yang memiliki kontribusi penting, namun sering terabaikan dan terpinggirkan adalah perempuan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, teknologi, informasi, dan proses pengambilan keputusan (Dankelman, 2010; Alston, 2013). Padahal jika dilihat secara dekat, perempuan juga memiliki kapasitas strategis dalam membangun ketahanan komunitas melalui pengelolaan sumber daya alam, penguatan ekonomi rumah tangga, ketahanan pangan, serta pengorganisasian sosial di tingkat lokal (Bhattarai, 2020; Mpuangnan & Govender, 2025). Dengan kata lain, sebenarnya mereka tidak hanya menjadi kelompok terdampak, tetapi juga berpotensi menjadi agen perubahan dalam proses adaptasi terhadap perubahan iklim.

Di Jawa Tengah, peran perempuan dalam merespons perubahan iklim semakin terlihat melalui berbagai aktivitas berbasis komunitas seperti restorasi mangrove, pengelolaan sampah, diversifikasi ekonomi rumah tangga, penguatan usaha mikro, hingga keterlibatan dalam Program Kampung Iklim (ProKlim). Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi tidak hanya pada aspek konservasi lingkungan, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Meski demikian, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan perubahan iklim masih relatif terbatas akibat hambatan struktural berupa budaya patriarki,

keterbatasan akses pendanaan, minimnya pelatihan teknis, serta rendahnya representasi perempuan di lembaga formal (Mustangin, 2017; Nagel, 2015; Lestari, et al, 2025).

Penelitian mengenai perempuan dan perubahan iklim telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti kerentanan gender, strategi adaptasi rumah tangga, serta partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan (Arora-Jonsson, 2011; Rokis et al., 2022; Lestari, et al, 2025). Beberapa penelitian sebelumnya, menemukan bahwa perempuan berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga saat menghadapi banjir rob dan ketidakpastian iklim, serta berkontribusi pada konservasi mangrove dan pengelolaan sumber daya pesisir. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan atau sebagai pelaksana program adaptasi (Rokis, R, et al, 2022). Kajian yang secara spesifik menghubungkan kepemimpinan perempuan dengan pembentukan ketahanan sosial-ekologis (*social-ecological resilience*) di masyarakat pesisir masih relatif terbatas, khususnya di Jawa Tengah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan perempuan sebagai *climate leaders* yang berperan aktif dalam membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana perempuan merespons dampak perubahan iklim melalui aktivitas lingkungan, tetapi juga bagaimana mereka membangun jaringan sosial, mempertahankan stabilitas ekonomi rumah tangga, serta memengaruhi tata kelola adaptasi iklim di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini menghubungkan peran kepemimpinan perempuan dengan dinamika kebijakan daerah melalui analisis integrasi isu perubahan iklim dalam visi dan misi kandidat kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Jawa Tengah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada tiga aspek utama. **Pertama**, menggeser perspektif dari perempuan sebagai kelompok rentan menjadi perempuan sebagai agen adaptasi dan pemimpin perubahan iklim. **Kedua**, mengintegrasikan pendekatan gender dengan konsep ketahanan sosial-ekologis untuk memahami kapasitas adaptasi masyarakat pesisir. **Ketiga**, menghubungkan praktik kepemimpinan perempuan ditingkat komunitas dengan konteks kebijakan dan politik perubahan iklim di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi isu perubahan iklim dalam agenda

politik lokal, mengkaji bentuk kepemimpinan perempuan dalam merespons dampak perubahan iklim, serta mengevaluasi implementasi kebijakan adaptasi iklim di Jawa Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian gender dan perubahan iklim, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kepemimpinan perempuan dalam merespons dampak perubahan iklim di Jawa Tengah. Pendekatan ini menyajikan data naratif sehingga menghasilkan temuan yang lebih mendalam (Creswell & Plano Clark, 2018).

Penelitian dilakukan di wilayah pesisir Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingginya kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim khususnya pada pesisir pantai, seperti; banjir rob, abrasi pantai, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah yang memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan laut, banjir rob, dan erosi pantai. Selain itu, wilayah ini memiliki aktivitas sosial ekonomi yang sangat bergantung pada sektor perikanan dan pertanian pesisir, yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan iklim. Ketiga wilayah ini terletak di pesisir utara Jawa yang menghadapi tantangan berupa penurunan muka tanah, intrusi air laut, dan perubahan pola cuaca yang dapat merusak ekosistem pesisir serta memengaruhi infrastruktur permukiman dan perekonomian setempat.

Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan perempuan pemimpin komunitas, masyarakat pesisir, pemerintah daerah, perempuan anggota DPRD kota/kabupaten dan DPRD Provinsi dengan daerah pemilihan di tiga kota/kabupaten serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam program adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, data juga diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen visi dan misi kandidat Pilkada 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Program Kampung Iklim (ProKlim), peraturan daerah, laporan pemerintah, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. **Pertama**, analisis dokumen kebijakan, pengambilan keputusan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana isu perubahan iklim diintegrasikan ke dalam visi dan misi kandidat kepala daerah serta kebijakan pembangunan daerah. Seluruh data dianalisis secara tematik dengan mengacu pada konsep kepemimpinan

perempuan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan ketahanan sosial-ekologis (*social-ecological resilience*) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Kedua, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir, bentuk kepemimpinan perempuan, serta kondisi kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim. **Ketiga**, analisis pola adaptasi masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan perempuan, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusinya dalam membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, wilayah pesisir utara Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal mengalami perubahan geografis secara ekstrim selama 2 dekade terakhir. Perubahan ini berupa; berubahnya posisi garis pantai yang menenggelamkan beberapa desa di wilayah Sayung Demak, naiknya air laut yang mengakibatkan tenggelamnya area pertanian warga. Banyak hal yang merubah pola hidup, cara bertahan hidup masyarakat.

Kondisi ini, menjadi perhatian khalayak sampai saat ini, mengingat persoalan ini masih belum memperoleh solusi. Termasuk dalam mekanisme demokrasi lima tahunan, sering sekali isu perubahan iklim serta berbagai solusi ditawarkan sebagai janji politik melalui kampanye yang dilakukan oleh para kandidat. Di bawah ini, deskripsi tentang isu perubahan iklim yang menjadi visi-misi kandidat calon dalam Pilkada.

Tabel 1. Isu Perubahan Iklim dalam Visi-Misi Kandidat dan Kondisi Riil Lapangan

Kota/Kab	Visi-Misi Kandidat Pilkada 2024	Kondisi Lapangan	Analisis Kesenjangan
Semarang	- Menyebut isu lingkungan dan banjir. - Fokus pada pembangunan tanggul laut dan perbaikan infrastruktur pesisir. - Isu iklim disebut, tetapi masih dalam narasi umum "pembangunan berkelanjutan".	- Setiap tahun terjadi banjir rob meluas di utara Semarang. - Penurunan muka tanah $\pm 10-15$ cm/tahun. - Dampak langsung pada permukiman dan kawasan industri.	Visi kandidat lebih menekankan infrastruktur fisik, belum mengintegrasikan isu iklim sebagai strategi lintas sektor (ekonomi, sosial, tata ruang).
Demak	- Visi-misi kandidat menekankan ketahanan pangan dan ekonomi nelayan. - Lingkungan disebut, tetapi perubahan iklim ekstrem tidak dijadikan agenda utama.	- Rob dan abrasi menyebabkan hilangnya ± 6 km² lahan pesisir dalam 20 tahun terakhir. - Intrusi air laut merusak sawah produktif. - Perempuan nelayan aktif dalam adaptasi komunitas (ekonomi alternatif, penanaman mangrove).	Kandidat memasukkan isu lingkungan secara umum, tetapi tidak spesifik pada dampak iklim ekstrem (rob, abrasi, intrusi air laut). Peran perempuan juga belum diakomodasi dalam agenda politik.
Kendal	- Visi kandidat lebih fokus pada infrastruktur pedesaan dan pembangunan kawasan industri. - Isu lingkungan hanya sebatas "pelestarian sumber daya alam".	- Daerah pesisir rawan rob, abrasi, dan krisis air bersih. - Lahan kritis meningkat, sehingga Pemkab meluncurkan program AKAR HANDAL. - Kelompok perempuan terlibat dalam pengelolaan sampah dan UMKM berbasis hasil laut.	Isu iklim tidak muncul eksplisit dalam visi kandidat. Ketahanan pesisir masih dianggap isu teknis, padahal ancamannya bersifat struktural dan jangka panjang.

Tabel 1. Isu Perubahan Iklim dalam Visi-Misi Kandidat dan Kondisi Riil Lapangan

Posisi Isu Perubahan Iklim dalam Agenda Politik Lokal di Jawa Tengah

Hasil wawancara mendalam, menunjukkan bahwa isu perubahan iklim telah masuk ke dalam wacana politik lokal di Jawa Tengah, khususnya di wilayah pesisir Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal. Melalui janji kampanye, para kandidat baik calon kepala daerah ataupun wakil rakyat melihat isu ini sangat seksi dan akan

memperoleh banyak simpati. Namun jika dianalisis lebih mendalam, isu tersebut belum sepenuhnya ditempatkan sebagai agenda utama dalam visi dan misi kandidat kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Analisis terhadap dokumen visi-misi kandidat menunjukkan bahwa narasi mengenai lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan memang muncul dalam berbagai program politik, tetapi pembahasan mengenai perubahan iklim ekstrem masih bersifat umum dan belum diterjemahkan ke dalam target yang terukur.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas ekologis yang dihadapi masyarakat selama ini dan agenda politik yang ditawarkan kepada publik. Padahal, wilayah pesisir Jawa Tengah merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir rob, abrasi pantai, intrusi air laut, penurunan muka tanah, dan perubahan pola curah hujan. Berbagai fenomena tersebut telah berdampak langsung pada sektor perikanan, pertanian pesisir, serta keberlanjutan permukiman masyarakat. Masyarakat membutuhkan implementasi strategis yang benar-benar berdampak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan iklim masih diperlakukan sebagai isu sektoral yang berdiri sendiri dan belum menjadi kerangka pembangunan lintas sektor. Narasi yang dominan dalam visi-misi kandidat lebih banyak berorientasi pada pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam jangka pendek. Akibatnya, isu perubahan iklim cenderung hadir sebagai pelengkap agenda pembangunan, bukan sebagai fondasi strategis yang mengintegrasikan tata ruang, pembangunan ekonomi, pengurangan risiko bencana, dan pengentasan kemiskinan. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Arora-Jonsson (2011) yang menjelaskan bahwa isu perubahan iklim dalam konteks politik lokal sering kali ditempatkan sebagai agenda sekunder karena dianggap kurang memiliki daya tarik elektoral dibandingkan isu-isu populis yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Kecenderungan di atas, ditemukan dalam penelitian data tentang minimnya komitmen politik yang secara eksplisit menargetkan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat pesisir, penguatan ekonomi hijau, maupun pengurangan kerentanan iklim secara sistematis. Dengan demikian, meskipun perubahan iklim telah menjadi bagian dari diskursus politik lokal, substansi kebijakan yang ditawarkan masih menunjukkan karakter simbolik dan belum mencerminkan urgensi kondisi ekologis yang dihadapi masyarakat pesisir di Jawa Tengah. Ini karena masing-masing wakil rakyat yang terpilih dengan diliputi wilayah terdampak juga tidak bisa “memaksakan” partai politik sebagai motor politik bergerak memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan mereka diantara semua kepentingan dan kebutuhan lainnya yang juga mendesak. Pun, ini terjadi pada pemerintah daerah, sudah dua tahun terakhir ini tidak teridentifikasi ada kebijakan yang

solutif untuk mengatasi persoalan yang diakibatkan oleh rob, banjir di Kota Semarang, dan Kabupaten Demak.

Kepemimpinan Perempuan dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Pertanyaan penelitian berikutnya, bagaimana respon kepemimpinan perempuan seperti yang dimaksud dalam penelitian ini? Riset ini tidak melihat dalam kacamata kepemimpinan formal saja, namun penelitian ini menemukan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam proses adaptasi terhadap perubahan iklim di tingkat komunitas, dalam kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal perempuan biasanya lahir secara alami di tingkat komunitas, desa, atau adat atau jabatan resmi. Kepemimpinan perempuan muncul tidak hanya dalam bentuk partisipasi sosial, tetapi juga sebagai aktor utama yang menginisiasi, mengorganisasi, dan mempertahankan berbagai praktik adaptasi berbasis komunitas.

Di wilayah pesisir Demak dan Semarang, perempuan terlibat aktif dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove baik dalam komunitas maupun individu/ rumah. Penyemaian bibit mangrove, penanaman di area belakang rumah yang terkepung air untuk mengurangi tingkat abrasi, dilakukan dengan sadar secara individual dan kelompok. Aktivitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan lingkungan dari abrasi dan banjir rob, tetapi juga berkembang menjadi sumber ekonomi alternatif melalui pengembangan produk olahan mangrove dan ekowisata berbasis masyarakat.

Sementara itu, di Kabupaten Kendal, kelompok perempuan mengembangkan berbagai usaha pengolahan hasil laut sebagai bentuk diversifikasi mata pencaharian dalam menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan nelayan akibat perubahan iklim. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan berperan sebagai agen adaptasi yang menghubungkan dimensi ekologis dan ekonomi secara bersamaan. Adaptasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam situasi ketika banjir rob, intrusi air laut, dan perubahan musim mengganggu mata pencaharian utama keluarga, perempuan menjadi aktor yang menjaga stabilitas ekonomi melalui usaha mikro, koperasi, dan jaringan ekonomi komunitas.

Hasil penelitian ini mendukung argumentasi Alston (2013) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki kapasitas adaptif yang tinggi karena kedekatan mereka dengan kebutuhan dasar keluarga dan komunitas. Perempuan akan cenderung mengembangkan strategi adaptasi yang berorientasi pada keberlanjutan kehidupan sehari-hari, termasuk pemenuhan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesehatan keluarga, dan penguatan solidaritas sosial. Melalui ikatan informal, kepemimpinan perempuan akan muncul (Datey, A, et al, 2023)

Sebenarnya di lapangan juga ditemukan data bahwa selain berperan dalam aspek ekonomi dan lingkungan, perempuan juga kadang terlibat dalam proses advokasi kebijakan di tingkat lokal walaupun kecil kuantitasnya. Keterlibatan mereka dalam Program Kampung Iklim (ProKlim), kumpulan PKK, musyawarah desa, dan forum-forum lain yang dilaksanakan melalui Fatayat, Muslimat dan kelompok pengajian, menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi mulai berperan sebagai penghubung antara komunitas, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah. Di Sayung Demak, audiensi bersama anggota DPRD Provinsi juga dilaksanakan, dan aspirasi, keinginan perempuan ditampung dan disampaikan. Dari perspektif ketahanan sosial (*social resilience*), temuan ini menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi pada penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi tekanan eksternal. Perempuan membangun jaringan sosial, mengorganisasi kelompok masyarakat, dan memperkuat solidaritas kolektif yang menjadi modal penting dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Oleh karena itu, perempuan tidak dapat lagi diposisikan hanya sebagai kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim, melainkan sebagai aktor strategis dalam membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir.

Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Adaptasi Iklim

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, kepemimpinan perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas peran perempuan dalam adaptasi iklim. **Pertama**, akses terhadap pendanaan masih relatif terbatas. Banyak kelompok perempuan mengalami kesulitan memperoleh dukungan finansial untuk mengembangkan program adaptasi karena mekanisme pendanaan yang rumit dan kompetitif. Akibatnya, berbagai inovasi yang telah berkembang di tingkat komunitas sering kali sulit untuk diperluas atau direplikasi.

Kedua, perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis. Informasi mengenai teknologi adaptasi, sistem informasi iklim, maupun pengelolaan sumber daya pesisir belum sepenuhnya menjangkau kelompok perempuan secara merata.

Ketiga, norma patriarki masih menjadi tantangan yang signifikan. Perempuan harus menjalankan peran domestik sekaligus terlibat dalam aktivitas sosial dan lingkungan. Beban ganda tersebut mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mustangin (2017) dan Ariadi (2023) yang menunjukkan bahwa konstruksi sosial gender masih menjadi penghambat utama partisipasi perempuan dalam pembangunan

lingkungan; dan **Keempat**, representasi perempuan dalam struktur formal pengambilan kebijakan masih rendah. Meskipun berperan aktif di tingkat komunitas, keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan lingkungan, dan forum strategis lainnya masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pengalaman dan kebutuhan perempuan sering kali tidak terakomodasi secara memadai dalam kebijakan adaptasi iklim. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan adaptasi iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekologis, tetapi juga erat kaitannya dengan relasi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung di masyarakat.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adaptasi perubahan iklim di Jawa Tengah telah menunjukkan berbagai kemajuan melalui integrasi program nasional dan kebijakan daerah. Program Kampung Iklim (ProKlim), rehabilitasi mangrove, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir menjadi bentuk nyata intervensi pemerintah dalam merespons dampak perubahan iklim. Pada tingkat komunitas, implementasi kebijakan relatif efektif ketika melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok perempuan. Kolaborasi multipihak tersebut terbukti mampu menghasilkan inovasi adaptasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih menghadapi beberapa hambatan penting. **Pertama**, keterbatasan anggaran menyebabkan banyak program adaptasi hanya berjalan dalam skala kecil dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah yang rentan. **Kedua**, masih terdapat tumpang tindih kebijakan antara sektor lingkungan, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur yang menyebabkan rendahnya integrasi program adaptasi. **Ketiga**, pendekatan implementasi yang masih bersifat *top-down* mengurangi ruang partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, perempuan masih diposisikan sebagai pelaksana kegiatan, bukan sebagai perumus kebijakan. Keempat, kapasitas teknis pemerintah daerah dalam sistem peringatan dini, pemetaan risiko iklim, dan penyediaan data lingkungan masih belum optimal, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali bersifat reaktif dibandingkan preventif.

Temuan ini menguatkan argumentasi Tschakert dan Machado (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan adaptasi iklim sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi kelompok rentan dan kemampuan institusi dalam menciptakan tata kelola yang inklusif. Adaptasi yang hanya berfokus pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan dimensi

sosial dan gender cenderung menghasilkan efektivitas yang terbatas dalam jangka panjang.

Perempuan sebagai Agen Ketahanan Sosial-Ekologis

Kepemimpinan perempuan merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat yang terkena dampak rob. Dalam kehidupannya sehari-hari, perempuan tidak hanya berkontribusi pada aspek lingkungan melalui konservasi mangrove dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga serta memperkuat jaringan sosial dalam komunitas. Dalam perspektif ketahanan sosial (*social resilience*), kemampuan komunitas untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kapasitas sosial masyarakat dalam membangun solidaritas, kerja sama, dan kelembagaan lokal. Perempuan memainkan peran sentral dalam proses tersebut karena mampu menghubungkan kebutuhan rumah tangga, komunitas, dan lingkungan secara simultan. Perempuan secara cepat beradaptasi untuk ketercukupan ekonomi keluarganya. Mereka melakukan aktifitas baru, dengan pengolahan hasil laut, pengolahan, menjadi distributor hasil laut, dan bahkan mengisi waktu mereka dengan mencari kerang di area sawah yang telah 20 tahun terendam air laut. Bhattarai (2020) di Nepal dan Singh et al. (2021) di India juga menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi iklim di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan sebagai agen perubahan sosial.

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan perubahan iklim menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, dengan pelibatan mereka dalam berbagai langkah. Perempuan harus ditempatkan tidak hanya sebagai kelompok sasaran kebijakan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi adaptasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan ketahanan iklim di Jawa Tengah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur adaptasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kepemimpinan perempuan sebagai pilar utama ketahanan sosial-ekologis di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Isu ancaman dari dampak perubahan iklim selama ini di pesisir Utara Jawa Tengah, telah masuk menjadi bagian dari kampanye politik di ranah politik lokal. Namun, rupanya isu ini belum sepenuhnya terintegrasi dan menjadi fokus utama dalam agenda visi-misi bakal calon kepala daerah di Jawa Tengah pada Pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Perubahan iklim dan dampaknya dalam masyarakat di Jawa Tengah masih dianggap bukan sebagai isu utama, melainkan sebagai isu tambahan dalam pembangunan yang menjadi janji kampanye. Isu ini tidak sepenuhnya diadopsi dalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan secara

komprehensif. Temuan riset memperlihatkan, tidak ditemukannya kebijakan strategis di Jawa Tengah dan kabupaten, kota yang menjadi lokus penelitian tentang dampak perubahan iklim yang solutif pasca pemilihan 2024. Ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan antara realitas ekologis yang dialami masyarakat terdampak dan prioritas agenda politik daerah yang ditetapkan (*climate politics gap*).

Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan formal menghadapi dampak perubahan iklim yang minimal ini, berbanding terbalik dengan partisipasi dan kepemimpinan pada komunitas informal. Kenyataannya perempuan di masyarakat tampil di depan beradaptasi menjadi tokoh utama dalam proses perubahan iklim selama ini. Dalam keluarga, dalam komunitasnya, perempuan menjadi agen dengan *social resilience* yang sangat tinggi mengatasi persoalan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Datey, B Bali, N Bhatia, L Khamrang, A gendered lens for building climate resilience: Narratives from women in informal work in Leh, Ladakh. *Gender, Work, and Organization*. 2023. <https://doi.org/10.1111/gwao.12667>
- Aldrian, E., M. Karmini, dan B. Budiman, *Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia*. Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Kedeputan Bidang Klimatologi ..., 2011. Accessed: Feb. 21, 2025. [Online].
- Ariadi, H., *Dinamika wilayah pesisir*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Aula, M. R., "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesia*, vol. 8, no. 2, pp. 186–201, Dec. 2023,
- Bhattarai, B. "How do gender relations shape a community's ability to adapt to climate change? Insights from Nepal's community forestry," *Clim Dev*, vol.s 12, no. 10, pp. 876–887, 2020, Accessed: Feb. 21, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1701971>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dankelman, I. (Ed.). (2010). *Gender and climate change: An introduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849775274> doi: 10.35706/jpi.v8i2.9859.
- Lee, H., et al., "IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report, Summary for Policymakers. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 2023. Accessed Feb. 21, 2025. [Online]. Available: <https://mural.maynoothuniversity.ie/id/eprint/17886/>

- Lestari, Puji; Arditama, E; Amrulloh, MF.; Hanida, M., Environmental Issues in Women's Political Campaigns: Legal Advocacy and Sustainable Development in Indonesian Local Politics. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*. Vol. 4 No. 1 (2025): January-June, 2025.
- Mabui, D. S. S. M. Fauzi, F. E. P. Lapiam, and C. Maya, "Sosialisasi Perubahan Iklim Dan Krisis Air," *Jurnal PAKEM AMATA*, vol. 4, no. 1, pp. 1–5, 2024, Accessed: Feb. 21, 2025. [Online]. https://doi.org/10.55334/pakem_amata.v4i1.267
- Mpuangnan, KN & Govender, Samantha. Women's Leadership in Climate Change Education. *Women's Leadership in African Education*. Book Chapter. pp 259–272. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-90038-9_12
- Mustangin, M. Konstruksi sosial gender dalam pembangunan lingkungan. *Jurnal Sosiologi*, 2017. 19(2), 115–128.
- Nagel, J. (2015). *Gender and climate change: Impacts, science, policy*. Routledge.
- Purify A, A. Kusman, S. Widodo, and F. Silitonga, "Perubahan Iklim dan Risiko Keamanan Nasional: Kajian Mengenai Kesiapsiagaan Pertahanan Indonesia," *Jurnal Elektrosista*, vol. 12, no. 1, pp. 1–11, 2024, Accessed: Feb. 21, 2025. [Online]. Available:<https://ojs.akmil.ac.id/index.php/jurnal-elektrosista/article/view/251>
- Rokis, R., et al., Gender vulnerability and household adaptation strategies to climate change. *Journal of Gender Studies*, 11(2) 2022, 89–104.
- Rokis, R, Silaturrahmi, P, Jalaludin, N., "Women Empowering Women": Informal Leadership Education on Becoming "Eco-Heroines" in Solid Waste. *Creative Education*, 2022, 13, 2168-2185. DOI: 10.4236/ce.2022.137137
- Singh, R., et al. (2021). Women as agents of social change in climate change adaptation: Insights from India. *Environmental Science & Policy*, 124, 210–218.
- Tschakert, P., & Machado, M. (2017). Gender, vulnerability, and adaptive capacity in local climate governance. *Climate and Development*, 9(3), 195–208.
- Yuwono, A. et al., *Gerakan Aksi Proklam Indonesia 2020-2030*. UGM PRESS, 2024.

